

**Pembangunan Daerah Kepulauan:
Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi
Maluku Utara**

**PEMBANGUNAN DAERAH
KEPULAUAN:
Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau
dan Provinsi Maluku Utara**

**Editor:
Prof. Dr. Achmad Suryana, M.S.**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2017

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara /Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, Hariyadi, Yuni Sudarwati; editor: Prof. Dr. Achmad Suryana, M.S.—Ed. 1; Cet. 1.—Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

xii + 110 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-582-3

Judul:

Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan
Provinsi Maluku Utara
Prof. Dr. Achmad Suryana, M.S. (ed.)

Copyrights © 2017

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Penerbitan ini atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2017
YOI: 1472.36.26.2018
Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10, Jakarta 10230
Telepon: +62 (0)21-31926978, 31920114
Faksimile: +62 (0)21-31924488
Email: yayasan_obor@cbn.net.id
Website: www.obor.or.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Salam Sejahtera,

Kami menyambut gembira atas terbitnya buku yang berjudul **“Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara”**, yang ditulis oleh para peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (BKD). Bagi Pusat Penelitian BKD, mempublikasikan karya tulis ilmiah (KTI) yang berasal dari hasil penelitian dan kajian peneliti bukan saja merupakan salah satu tugas utama pusat penelitian namun sekaligus juga memenuhi tuntutan pelayanan keahlian kepada Anggota dan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tuntutan pelayanan dukungan keahlian ini tentu diarahkan untuk memberikan informasi, data, gagasan dan pemikiran dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPR RI. Hasil kajian lebih lanjut disampaikan melalui proses pendampingan baik dalam pelaksanaan tugas penyusunan, pembahasan maupun pengawasan DPR RI. Sinergi antara upaya pemenuhan tuntutan pelayanan kepada DPR RI dengan pelaksanaan tanggung jawab sebagai peneliti dalam pengembangan kemampuan akademis merupakan salah satu cara yang terus dikembangkan dan diperkuat sebagai upaya tindak lanjut reformasi kelembagaan DPR RI. Kami percaya melalui penerbitan buku dan tulisan dari para peneliti ini menjadi salah satu wujud implementasinya.

Buku ini mengusung satu tema penting, yakni **“Politik atau Strategi Pembangunan Ekonomi Wilayah Provinsi Kepulauan”**.

Tema ini kemudian dielaborasi dengan tiga karya tulis ilmiah dengan fokus pada tiga subtema, yakni isu-isu tentang pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur sistem kelistrikan wilayah kepulauan, dan strategi pemasaran potensi pariwisata. Ketiga karya ilmiah ini memiliki keterkaitan yang baik untuk memperkaya pembahasan tentang strategi pengelolaan pembangunan ekonomi wilayah kepulauan dari salah satu perspektif yang berbeda. Kami sampaikan apresiasi kepada masing-masing penulis, yaitu Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, Hariyadi, dan Yuni Sudarwati yang telah bekerja dengan baik dan melahirkan karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata, kami sampaikan juga apresiasi kepada Prof. Dr. Achmad Suryana, MS. yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya sebagai editor buku ini. Kepada penerbit disampaikan penghargaan atas kerja samanya dalam penerbitan bersama dengan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Besar harapan Kami, buku ini akan bermanfaat tidak hanya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusional DPR RI tetapi juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Kritik dan saran dari pembaca selalu kami nantikan untuk perbaikan karya-karya Pusat Penelitian BKD ke depan.

Selamat Membaca.

Jakarta, Oktober 2017
Kepala Pusat Penelitian BKD,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 19711117 199803 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI	v
Daftar Isi	vii
Bagian I Prolog	1
Bagian II Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Sumber daya Manusia di Provinsi Kepulauan Riau dan Maluku Utara	
<i>Sahat Aditua Fandhitya Silalahi</i>	7
I. Pendahuluan	7
II. Otonomi Daerah Dan Strategi Pembangunan Wilayah Kepulauan	10
III. Sistem dan Besaran Anggaran Provinsi Kepulauan	12
IV. Pertumbuhan Ekonomi Dan Angka Kemiskinan	17
V. Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia	25
VI. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan	31
VII. Kesimpulan	36
Daftar Pustaka	38
Bagian III Agenda Elektrifikasi Wilayah Kepulauan: Studi Di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara	
<i>Hariyadi</i>	41
I. Pendahuluan	41

II. Proyeksi Kebutuhan Sistem Kelistrikan	45
III. Program Pembangkit 35 GW Dan Target Pemenuhan RE Kepulauan	52
IV. Provinsi Kepri Dan Provinsi Malut Dalam Kerangka Target RE Nasional	58
V. Penutup	68
Daftar Pustaka	71
Bagian IV Pemasaran Industri Pariwisata Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau	
<i>Yuni Sudarwati</i>	73
I. Pendahuluan	73
II. Strategi Pemasaran	76
III. Pemasaran Industri Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	81
IV. Penutup	95
Daftar Pustaka	97
Bagian V Epilog	99
Indeks	103
Tentang Editor dan Penulis	107

DAFTAR TABEL

BAGIAN III

Tabel 1.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Kepri	47
Tabel 2.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Kepulauan Malut	50

BAGIAN IV

Tabel 1.	Jumlah Kunjungan Wisman ke Kepri Menurut Pintu Masuk	75
----------	---	----

DAFTAR GAMBAR

BAGIAN II

Gambar 1	Alokasi DAU Provinsi Kepri Tahun 2013-2017	15
Gambar 2	Alokasi DAU Provinsi Malut Tahun 2013-2017	15
Gambar 3	Alokasi DAK Provinsi Kepri Tahun 2014-2017	16
Gambar 4	Alokasi DAK Provinsi Malut Tahun 2014-2017	16
Gambar 5	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2011 - 2014.	18
Gambar 6	Angka Kemiskinan di Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2008-2013	19
Gambar7	Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2008-2013.	20
Gambar 8	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Malut dan Nasional Periode Tahun 2011-2014	21
Gambar 9	Angka Kemiskinan di Provinsi Malut dan Nasional Periode Tahun 2011-2014	22
Gambar10	Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Malut (Rata-rata Tahun 2003-2013).	23
Gambar 11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri dibandingkan dengan IPM Nasional Tahun 2010- 2015	26
Gambar 12	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri (Rata-Rata periode	

	Tahun 2008-2013)	28
Gambar 13	IPM Provinsi Malut Dibandingkan dengan IPM Nasional Periode Tahun 2011-Tahun 2016	29
Gambar 14	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Peningkatan IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Malut (Rata-Rata periode Tahun 2008-2013)	30
 BAGIAN III		
Gambar 1.	Peta Sistem Kelistrikan Provinsi Kepri	42
Gambar 2.	Peta Sistem Kelistrikan Provinsi Malut	44

BAGIAN I

PROLOG

Achmad Suryana

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan jumlah pulau besar dan kecil sangat banyak, seringkali dilakukan pembulatan mengenai jumlah ini, yaitu sebanyak 17 ribu pulau. Dengan pulau sebanyak itu, negara kepulauan ini memiliki garis pantai sepanjang 80.791 km² dan luas perairan mencapai 3,25 juta km² atau sekitar 63% wilayah Indonesia. Penegasan status Indonesia sebagai negara kepulauan dilakukan oleh Pemerintah melalui deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi mengenai wilayah perairan Indonesia dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Melalui UU ini ditegaskan dalam struktur kewilayahan Indonesia, perairan tidak lagi dipandang sebagai pemisah antarpulau melainkan merupakan suatu kesatuan yang menghubungkan keberadaan pulau-pulau tersebut.

Pada saat ini di Indonesia ada tujuh provinsi kepulauan, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Perhatian Pemerintah terhadap pembangunan daerah kepulauan, salah satunya dapat dikaji dari besaran dana alokasi khusus (DAK)

yang diperuntukkan untuk membangun daerah ini, khususnya pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas intra—dan antarprovinsi dan energi sebagai penunjang kelancaran pembangunan serta kelancaran operasionalisasi pascapembangunan. Keberadaan infrastruktur dan energi yang memadai pada gilirannya akan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya sekaligus mempercepat pembangunan daerah kepulauan.

Buku *Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku Utara* ini mencoba memberi gambaran perkembangan pembangunan di provinsi kepulauan yang memiliki potensi yang khas yang bila dimanfaatkan dengan optimal dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Namun, dibandingkan dengan provinsi “daratan”, bila hanya mempertimbangkan kondisi sumber daya alam, maka tantangan, permasalahan, dan kendala pembangunan di provinsi kepulauan mempunyai kompleksitas yang jauh lebih besar, salah satunya adalah dalam pengembangan konektivitas antardaerah di dalam provinsi kepulauan tersebut.

Sesuai dengan judulnya, buku ini tidak membahas seluruh provinsi kepulauan dan juga tidak mendiskusikan seluruh aspek atau sektor pembangunan. Tiga artikel yang dimuat dalam buku ini menjelaskan sebagian kecil dari aspek pembangunan yang berlangsung di dua provinsi kepulauan, yaitu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Provinsi Maluku Utara (Malut). Kedua provinsi ini diharapkan dapat mewakili provinsi kepulauan lainnya di Indonesia yang dalam pelaksanaan pembangunan ekonominya menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan karakter geografis, terutama luas wilayah perairan jauh lebih besar dibandingkan dengan daratan.

Artikel pertama mengulas strategi percepatan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, ditulis oleh *Sahat Aditua Fandhitya Silalahi*. Penulis menyimpulkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri dan Malut berada di atas rata-rata pertumbuhan

nasional, angka kemiskinan juga lebih rendah dibandingkan angka nasional. Namun, tidak semua kabupaten/kota di kedua provinsi ini menikmati hasil pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dalam aspek kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dicerminkan oleh angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Kepri mencatat kenaikan yang positif dengan nilai di atas rata-rata IPM nasional, tetapi masih terdapat kabupaten/kota yang belum mampu untuk meningkatkan IPM-nya. Sementara itu, di Provinsi Maluku walaupun terjadi tren kenaikan angka IPM, tetapi angkanya masih di bawah rata-rata nasional.

Dengan gambaran pembangunan ekonomi dan SDM seperti itu, *Sahat Silalahi* menyarankan perlu adanya sinergi dan fokus kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas program pembangunan ekonomi dan sosial di setiap kabupaten/kota di kedua provinsi ini, dengan memperhatikan sektor unggulan, penciptaan nilai tambah, dan penambahan lapangan kerja. Selain itu perlu ada alokasi dana yang cukup untuk percepatan dan penguatan program Pemerintah Daerah terutama pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

Terkait dengan strategi percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Kepri, menurut penulis artikel ini kegiatan prioritas hendaknya ditujukan pada penguatan potensi lokal dengan membentuk kawasan industri terpadu dan menggali peluang bagi perdagangan dari daerah ini ke tingkat regional, nasional, maupun internasional. Sementara itu kunci percepatan pembangunan di Provinsi Maluku ada pada penguatan konektivitas infrastruktur antarwilayah, terutama untuk menghubungkan wilayah dan pulau-pulau terpencil guna meningkatkan aktivitas perekonomian sekaligus mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Artikel kedua ditulis oleh *Hariyadi* membahas agenda elektrifikasi di dua provinsi kepulauan. Untuk mempercepat pembangunan di kedua provinsi ini, pemenuhan pasokan listrik

guna menunjang kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi menjadi agenda penting. Sampai sekarang kebutuhan pasokan listrik di Provinsi Kepri dipenuhi dengan sistem pembangkit (besar) dan sistem yang terisolasi (*isolated system*). Sebagian besar sistem *isolated* mengalami kekurangan pasokan dalam beberapa tahun terakhir, yang pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah daya, gangguan pembangkit, usia pembangkit, dan meningkatnya permintaan. Kondisi yang lebih memprihatinkan terkait pengadaan pasokan listrik ditemui di Provinsi Malut. Kondisi belum terpenuhinya kebutuhan pasokan listrik tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kedua provinsi itu. Permasalahan menjadi lebih besar, manakala di kedua provinsi ini terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang signifikan, yang tentu saja memerlukan tambahan energi listrik.

Secara umum, menurut *Hariyadi*, pengembangan infrastruktur sistem kelistrikan di Provinsi Kepri lebih maju jika dibandingkan dengan di Provinsi Malut. Penilaian ini berdasarkan tingkat rasio elektrifikasi (RE) dan tingkat pasokan listrik, yaitu rata-rata tingkat RE di Kepri telah berada di atas tingkat rata-rata RE nasional. Secara nasional, pencapaian RE mengalami pertumbuhan positif setiap tahun dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Indonesia timur yang mencapai 5,9%, tetapi secara keseluruhan tingkat RE di wilayah ini masih rendah dari rata-rata nasional. Sampai tahun 2014, tingkat RE secara nasional mencapai 84% dan di wilayah Indonesia timur baru mencapai 73,9%.

Pemenuhan akses listrik merupakan hak mendasar setiap warga negara seiring pentingnya akses listrik bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Karena itu, ketersediaan listrik dengan harga yang terjangkau dan mencukupi bagi semua lapisan masyarakat merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat. Isu ini menjadi semakin penting dalam konteks pemenuhan akses masyarakat yang tinggal di daerah-daerah perbatasan, desa-desa tertinggal, dan daerah kepulauan. Serangkaian

kebijakan dalam rangka mempercepat tingkat elektrifikasi di wilayah kepulauan telah diambil, misalnya kebijakan Indonesia Terang dan kebijakan percepatan pembangunan pembangkitan 35.000 MW, program listrik desa, dan pemberian insentif bagi pengembang listrik di wilayah terluar.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, diharapkan sasaran pencapaian tingkat elektrifikasi regional dan nasional dapat tercapai. Namun demikian, untuk mewujudkannya dihadapkan pada sejumlah tantangan terkait dengan kentalnya konteks tata kelola daerah, kondisi geografis, dan ketersediaan pendanaan. Sehubungan dengan hal tersebut *Hariyadi* menyorakan dua hal sebagai berikut. *Pertama*, penguatan kemauan politik Pemerintah Daerah dalam menggalang sinergi dengan provinsi kepulauan lain untuk mendorong Pemerintah Pusat atas skema penganggaran pembangunan infrastruktur khususnya sektor kelistrikan. *Kedua*, penguatan sinergi dan kesatuan visi politik provinsi-provinsi kepulauan dalam merespons agenda legislasi yang sifatnya khusus bagi pembangunan wilayah kepulauan.

Di provinsi kepulauan dan dengan dukungan kelistrikan yang prima, berbagai sektor ekonomi dapat dikembangkan, terutama yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif serta keunggulan kompetitif wilayah khas kepulauan. Dalam buku ini hanya satu sektor yang didiskusikan, yaitu industri pariwisata oleh *Yuni Sudarwati*, dengan fokus pada upaya pemasaran obyek wisata di Provinsi Kepri.

Bagi pariwisata Indonesia, Provinsi Kepri merupakan gerbang wisata mancanegara kedua setelah Pulau Bali dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Potensi objek wisata di Kepri cukup menyebar, diantaranya Pantai Melur di Kota Batam, Pantai Belawan di Kabupaten Karimun, Pantai Lagoi dan Bintang *Leisure Park* di Kabupaten Bintan, dan Kepulauan Anambas yang memiliki potensi wisata yang sangat indah. Selain wisata pantai dan bahari, Kepri juga memiliki objek wisata cagar budaya, makam-makam bersejarah, dan Pulau Galang bekas lokasi pengungsian warga Vietnam. Namun

demikian, potensi wisata yang besar ini belum mampu berkontribusi optimal terhadap perekonomian provinsi ini.

Potensi pariwisata yang sangat besar tidak berarti apa-apa jika tidak memiliki kemampuan mengemasnya, mempromosikannya, dan memasarkannya. Kemampuan tersebut sangat penting untuk dapat menarik minat wisatawan berkunjung lebih banyak lagi ke berbagai obyek wisata yang disebutkan di atas. Namun demikian, pengemasan atau pemasaran paket wisata yang baik akan tidak banyak manfaatnya bahkan akan menjadi bumerang bagi pengembangan pariwisata di daerah ini apabila kenyataan di lapangan obyek-obyek wisata tersebut belum siap “dinikmati” karena masih memiliki banyak kendala. Di provinsi kepulauan ini kendala utama untuk pengembangan pariwisata diantaranya adalah ketiadaan infrastruktur pendukung seperti energi listrik dan transportasi.

Menurut *Yuni Sudarwati* dalam artikel ketiga buku ini, dari sisi regulasi Kepri telah memiliki kekuatan yang cukup dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022. Perda ini merupakan dasar yang kuat bagi pengembangan pariwisata di Kepri, termasuk bagi terwujudnya pembangunan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun sinergitas dalam pembuatan kebijakan operasional kepariwisataan dan tentu saja dalam pelaksanaannya. Pembangunan pariwisata Kepri tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata tetapi juga merupakan permasalahan pembangunan daerah dari seluruh unsur Pemda, bahkan Pemerintah Pusat.

Achmad Suryana
Editor

BAGIAN V

EPILOG

Achmad Suryana

Tiga artikel dalam buku berjudul *Pembangunan Daerah Kepulauan: Studi Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Maluku Utara* ini walaupun tidak membahas secara lengkap berbagai sektor pembangunan di daerah, tetapi telah memberikan gambaran betapa luas dan besarnya potensi ekonomi yang dimiliki daerah kepulauan yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tingkat pemanfaatan ini terkait dengan capaian dari pengembangan infrastruktur ekonomi yang belum dibangun dengan baik dan lengkap.

Buku ini mengulas perlunya membangun infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur energi kelistrikan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di dua provinsi kepulauan. Secara khusus dalam buku ini dibahas peluang membangun sektor industri pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki potensi besar melalui kegiatan promosi dan pemasaran. Namun untuk melaksanakan promosi dan pemasaran industri pariwisata yang berdaya guna, industri ini harus sudah siap ditunjang oleh infrastruktur pariwisata yang lengkap dan berkualitas, termasuk di dalamnya kedua jenis infrastruktur yang disebutkan di atas. Pada saat ini infrastruktur ekonomi di dua provinsi ini belum terbangun dengan baik.

Investasi merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk daerah kepulauan. Pemerintah Daerah harus mampu merancang strategi yang sistemik untuk menawarkan potensi sumber daya pembangunan di daerahnya masing-masing kepada investor dan masyarakat secara luas. Melalui investasi pemerintah dan swasta dalam berbagai bidang ekonomi yang potensial berkembang di daerah yang bersangkutan, akan tumbuh kesempatan kerja baru, peningkatan pendapatan daerah, dan percepatan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup penduduk di daerah tersebut.

Seperti telah dikemukakan di depan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri maupun Malut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata angka kemiskinan nasional. Namun demikian bila melihat dari level kabupaten/kota tidak semua wilayah menikmati hasil pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin. Untuk itu diperlukan kebijakan operasional yang dapat meningkatkan efektifitas program pembangunan ekonomi di level kabupaten/kota, dengan memperhatikan sektor unggulan, potensi pembentukan nilai tambah, dan penciptaan lapangan kerja. Pilihan sektor ekonomi yang dikembangkan dan jenis usaha yang didorong perlu disesuaikan dengan kapasitas SDM setempat.

Dalam laporan hasil penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI yang berjudul "Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (Studi Kasus Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Dan Maluku Utara), dikemukakan beberapa temuan dan kesimpulan penting terkait dengan upaya percepatan pembangunan daerah kepulauan. *Pertama*, terdapat kesenjangan antara alokasi penganggaran untuk wilayah kepulauan sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yaitu formula alokasi anggaran transfer ke daerah harus juga melibatkan potensi wilayah yang sebagian besar berupa perairan. *Kedua*, masih

Epilog

terbatasnya infrastruktur pendukung konektivitas intra-provinsi kepulauan yang menyebabkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antarkabupaten/kota di provinsi tersebut tidak seimbang. Selain itu lemahnya infrastruktur pendukung konektivitas juga menyebabkan permasalahan distribusi, baik bahan kebutuhan pokok ataupun bahan baku produksi, yang dapat menyebabkan harga input dan output menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah lain. Hal ini berarti pula memperlemah daya saing perdagangan antardaerah.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus mempercepat pembangunan di provinsi kepulauan, hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat menempuh kebijakan sebagai berikut: (1) mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu memperkuat konektivitas antarpulau di provinsi kepulauan, baik infrastruktur pelabuhan, bandara perintis, ataupun jalan, dan (2) mengevaluasi ulang kebijakan formulasi alokasi dana transfer untuk provinsi kepulauan dan meninjau ulang kebijakan pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang tercantum dalam UU No 33 Tahun 2004. Semoga dapat direalisasikan.

Editor

INDEKS

A

Alokasi,
 dana, 3, 101
 DAU, 14-15
 DAK, 15-16
anggaran, 24, 27-28, 64, 67, 92
alam, 83-84
APBN, 13, 16

B

Batubara, 49, 54, 58,75
BBM, 44-45, 50, 54, 72
Belanja, 84

C

Cervantes-Godoy, D. and J. Dewbre,
 17
Conoco Philips, 62
CSR, 64-65
CNN, 76

D

daerah, 1, 3-5, 6, 8, 10-14, 16, 19,
 23-24, 27, 29-32, 34, 36, 51, 56,
 59-60, 63-70, 73, 80-83, 86-87,

90-103

dana

 alokasi khusus, 1
 transfer, 8, 101
daratan, 2, 7-9, 11, 32, 36, 57
defisit, 45, 59, 67,
desentralisasi, 8, 10, 13-14, 31, 66
diesel, 45, 48, 49

E

ekonomi,
 pertumbuhan, 2-7, 9, 11, 19-29,
 32-33, 35-37, 41, 44-49, 52-
 53, 55, 66, 69, 73, 88, 100
 pembangunan, v-vi, 2-3, 7, 9,
 27, 30, 36, 44, 48-49, 55, 88,
 99-100
elektrifikasi
 agenda, 3, 41
 rasio, 4, 43, 58, 72
 tingkat, 5, 46, 55, 68-69
energi, 2, 49, 54-55, 58-59, 66-68,
energi listrik, 4, 6, 58, 60-61, 76, 86,
 95

F

fiskal
 desentralisasi, 10, 31

- potensi, 10, 14
- H**
- H. Himawan, 94
- I**
- Industri
pariwisata, 5, 61, 73, 76-78, 81,
82, 84, 86, 88, 99
- Infrastruktur
pembangunan, 2, 5-6, 35, 51, 57,
60, 62, 67, 69, 95, 101,
pengembangan, 4, 48, 57, 99,
106
- Investasi, 87-88, 91-92, 100
- J**
- J. Dewbre, 17
- J. Manafe, 17
- K**
- kabupaten, 46, 59, 64, 66, 70-71, 83,
101
- kebutuhan investasi, 54
- kelistrikan, 4-5, 44-45, 47-52, 55-60,
63-66, 69-70, 99
- kementerian, 53, 65
- kemiskinan,
angka, 3, 9, 17-19, 21-24, 34, 36,
100
- Kepulauan
daerah, 1, 4, 11-12, 31, 56, 67-
69, 73, 87, 99-100
- provinsi, 1-8, 10-12, 36, 41, 43,
56-57, 69-70, 73, 82, 90, 94,
99, 101
- konektivitas, 2-3, 24, 33-37, 76, 90,
99, 101
- Kota, 3, 5, 19-24, 26, 28-29, 36, 64,
70, 83, 94
- kuadran, 19-20, 22
- kuadran I, 19, 23, 26, 29
- kuadran II, 19, 22, 24, 27
- kuadran III, 20, 23-24, 30
- L**
- lembaga, 53, 65
- Listrik
akses, 4, 44, 56, 59, 68
- energi, 4, 6, 58, 60-61, 76, 86, 95
- pasokan, 3, 42, 45-49, 51-52, 58,
61-62, 64, 67
- M**
- Maluku Utara, 7-9, 21, 34, 41, 43, 62,
74, 99-100
- Manusia
sumber daya, vi, 2-3, 7, 9, 11, 25,
29, 30, 32, 36, 70, 77, 82, 87,
102
- indeks pembangunan, 3, 14, 25,
38
- Megawatt, 42
- N**
- nasional
angka, 3
- pertumbuhan, 2, 18, 36,

Indeks

N.U. Napitupulu, 77

31-32, 36-39, 41-43, 45-50,
57-61, 67-68, 74, 82-83, 88-
89, 93-94, 100

O

optimal, 6, 36, 44, 80, 99

operasional

kebijakan, 100

operasionalisasi, 2

Malut, 3-4, 8-10, 14-16, 20-23,
29-30, 33-38, 43-44, 48-50,
57-58, 62-67

P

pariwisata

industri, 61, 73, 76-78, 8-82, 84,
86, 88-91, 99,

potensi, vi, 5, 6, 12, 62, 73-74,
82, 95

panas bumi, 45, 49, 65,

pembangunan (lihat "kepulauan")

Pemerintah

Daerah, 3, 5, 8, 10, 21, 31-32, 36-
38, 59-60, 64, 67-69, 81-82,
88-92, 100,

Pusat, 5-6, 8, 10, 12, 31-32, 36-
37, 59-64, 66, 68-70, 79, 81,
87-88, 94, 96

Perimbangan

Dana, 13, 69

Keuangan Pusat dan Daerah, 13-
17, 100-101

Pertumbuhan

ekonomi, 2-4, 9, 17-35, 38, 41,
45, 47, 49-50, 52-53, 68-69,
88, 100

ekonomi daerah, 100

primer

potensi energi, 49

sumber energi, 47-49, 54,

promosi, 76, 79-80, 86-100

Provinsi

Kepri, 2-10, 14-20, 25-26, 28,

R

Rasio

elektrifikasi, 4, 43, 46, 48, 58

kemandirian, 31

S

sumber daya

alam, 2, 11-12, 20, 32, 52, 79,

mineral, 47-48

swasta, 33, 42, 45, 56, 82, 100

T

transmisi, 47-48, 51-52

Transportasi, 6, 11, 32-35, 76, 87,
91, 95, 100

U

up date, 84

upaya konsolidasi, 70

up to date, 93

V

Variable, 63

variable resistensi, 59

W

wilayah

kepulauan, vi, 5, 8-12, 33, 41, 56,
58-59, 64, 67, 70, 100

pengembangan, 84-85

wisatawan, 6

wisatawan mancanegara, 73, 75, 89

Y

Y.A. Alang, 80

Z

ZEE, 7, 62

BIOGRAFI EDITOR DAN PENULIS

BIOGRAFI EDITOR

Achmad Suryana lahir di Tasikmalaya Jawa Barat, Juli 1954 adalah Profesor Riset/Peneliti Utama pada Pusat Analisis Sosial Ekonomi Pertanian, Kementerian Pertanian sejak tahun 2007. Suryana menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 1978 dan S2 tahun 1980 di Institut Pertanian Bogor dengan bidang keahlian sosial ekonomi pertanian dan S3 (*Ph.D in economics*) pada tahun 1986 di *North Carolina State University*, Amerika Serikat. Suryana sejak awal berkarir di Kementerian Pertanian, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2004-2008) dan Kepala Badan Ketahanan Pangan (2000-2004 dan 2008-2014). Achmad Suryana menjadi Ketua Kelompok Kerja Pemerintah dalam tiga pembahasan Undang-Undang, yaitu UU Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BIOGRAFI PENULIS

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, adalah peneneliti madya bidang Manajemen Industri, di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPRI. Penulis memperoleh gelar *Master of Business Administration (MBA)* di Magister Manajemen, Universitas Gadjah Mada, pada Tahun 2009. Penulis menaruh minat pada isu perindustrian, perdagangan,

Koperasi dan UKM, serta BUMN. Beberapa karya tulis yang pernah dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain “Strategi Ekspansi BUMN Bidang Telekomunikasi (2016)”, “Kajian Pembentukan Holding BUMN Perkebunan (2016)”, Kebijakan Penyesuaian Harga dan Pengembangan Infrastruktur Distribusi Gas Bumi (2016), “Peran Permodalan Koperasi Berbasis Komunitas UKM (2016)”, dan “Empat Catatan Kebijakan pada Industrialisasi Indonesia (2015)”. Penulis dapat dihubungi melalui email :sahatsilalahi81@gmail.com

Hariyadi, lahir di Banyumas, 11-12-1970, peneliti madya bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, Jakarta, (1997 - sekarang). Menyelesaikan pendidikan S-1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1990-95) dan *Master in Public Policy Programme, Faculty of Economics, Business and Policy Studies, Univ. of Brunei Darussalam, Brunei Darussalam (2001-02)*. Saat ini, ybs. sedang mengikuti Program S3 Ilmu Lingkungan, Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Serangkaian kursus yang pernah diikuti antara lain, *Joint Training Program in Parliamentary Research and Information Service Provision, the Centre for Democratic Institutions, Parlemen Australia, Canberra, 16-27 Agustus 1999, Parliamentary Internship Program (ITEC Plan Sponsorship), Lok Sabha Secretariat, New Delhi India, 1 – 30 November 2007, Advanced Professional Training, Managing Global Governance (MGG), Bonn, Republik Federal Jerman, Juni–Desember 2011, dan magang dalam kerangka MGGProject Phase di Badan Lingkungan Uni Eropa, Kopenhagen, Denmark (Oktober - Desember 2011)*. Di samping aktif dalam kegiatan sosial, juga aktif menulis di beberapa media nasional dan lokal.

Yuni Sudarwati, S.IP., MSi lahir di Purwokerto tanggal 6 Juni 1977. Pendidikan S1 dengan jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gadjah Mada diselesaikan

pada tahun 2000, setelah itu jenjang pendidikan dilanjutkan ke S2 pada Program Studi Manajemen, Magister Sains Ilmu Ekonomi-Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2003. Pekerjaan sebagai peneliti di bagian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan-DPR RI dimulai sejak tahun 2009. Adapun kepakaran yang dikuasai adalah bisnis dan manajemen, dengan kekhususan di bidang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dihasilkan antara lain Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja Dalam Komunitas Ekonomi Asean (KEA) 2015 (dimuat pada *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik P3DI*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014), Strategi Pengembangan Merek Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (dimuat pada *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik P3DI*, Vol. 4, No. 1, Juni 2013), dan Studi Perbandingan Antara Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan Rancangan Undang-Undang Koperasi 2010 (dimuat pada *Widyaiset* Vol.15 No.1 April 2012). Surat elektronik dapat dialamatkan ke: yuni.sudarwati@dpr.go.id.

